



# Analisis Ketepatan Kebijakan Pendidikan Pada Masa Orde Baru di SD Negeri Banjaragung 1

Anggi Maulidia<sup>1</sup>, Sri Minarti<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Bojonegoro, Jawa Timur

<sup>2</sup> Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Bojonegoro, Jawa Timur  
[maulidiadiaa078@gmail.com](mailto:maulidiadiaa078@gmail.com)<sup>1</sup>, [minarti@unugiri.ac.id](mailto:minarti@unugiri.ac.id)<sup>2</sup>

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received 1 Mei 2026

Revised 10 Mei 2026

Accepted 20 Mei 2026

Available online 29 Mei 2026

### Kata Kunci:

*Education Policy, New Order, Inpres Elementary School, Curriculum, Banjaragung 1 Public Elementary School*

### Keywords:

*Qawa'id wa Tarjamah Method, Communicative Method, Arabic Language Learning, Comparative Study, Contemporary Literature*

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Universitas Garut.

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi ketepatan kebijakan pendidikan pada masa Orde Baru dan implementasinya di SD Negeri Banjaragung 1. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dan pendekatan studi literatur (*library research*). Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber sekunder, termasuk buku, artikel, jurnal ilmiah, dan dokumen kebijakan pendidikan yang relevan. Fokus penelitian adalah kebijakan SD Inpres, program wajib belajar, perubahan kurikulum (1968, 1975, 1984, dan 1994), dan sistem pendidikan zaman Orde Baru, serta pengaruh mereka terhadap pelaksanaan pendidikan di SD Negeri Banjaragung 1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan pada masa Orde Baru memainkan peran penting dalam meningkatkan akses pendidikan dasar di Indonesia. Ini terbukti di SD Negeri Banjaragung 1, di mana program wajib belajar dan Program SD Inpres berhasil memperluas jangkauan pendidikan dan meningkatkan partisipasi siswa. Namun demikian, dari sudut pandang kualitas, pendidikan pada masa itu masih menghadapi banyak tantangan. Ini termasuk pembelajaran hafalan yang mendominasi, distribusi tenaga pendidik yang tidak merata, dan kekurangan fasilitas pendidikan. Selain itu, sistem pendidikan yang sentralistik menyebabkan kurangnya fleksibilitas dalam pembelajaran dan kurangnya ruang untuk kreativitas dan pemikiran kritis siswa. Di SD Negeri Banjaragung 1, kondisi ini ditunjukkan oleh penggunaan metode pembelajaran konvensional dan ketersediaan sumber daya pendidikan yang terbatas. Meskipun demikian, kebijakan pendidikan Orde Baru terus membantu pemerataan pendidikan di Indonesia. Hasilnya adalah bahwa kebijakan pendidikan pada masa Orde Baru di SD Negeri Banjaragung 1 cukup tepat

dalam hal pemerataan akses ke pendidikan, tetapi belum optimal dalam hal meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan,

## ABSTRACT

*The purpose of this research is to evaluate the appropriateness of educational policies during the New Order era and their implementation at SD Negeri Banjaragung 1. The research method used is descriptive qualitative and a literature study approach (library research). Research data were obtained from various secondary sources, including books, articles, scientific journals, and relevant educational policy documents. The focus of the research is on the Inpres Elementary School policy, the compulsory education program, curriculum changes (1968, 1975, 1984, and 1994), and the education system during the New Order era, as well as their impact on the implementation of education at SD Negeri Banjaragung 1. The research results show that education policies during the New Order period played a significant role in improving access to basic education in Indonesia. This is evident at SD Negeri Banjaragung 1, where the compulsory education program and the Inpres Elementary School Program successfully expanded the reach of education and increased student participation. However, from a quality perspective, education at that time still faced many challenges. This includes the dominance of rote learning, uneven distribution of educators, and a lack of educational facilities. Additionally, the centralized education system leads to a lack of flexibility in learning and insufficient space for student creativity and critical thinking. At SD Negeri Banjaragung 1, this condition is demonstrated by the use of conventional teaching methods and the limited availability of educational resources. Nevertheless, the New Order's education policy continues to support the equitable distribution of education in Indonesia. The result is that the education policy during the New Order era at SD Negeri Banjaragung 1 was quite effective in terms of equalizing access to education, but not yet optimal in terms of improving the overall quality of education.*

## 1. PENDAHULUAN/INTRODUCTION

Pendidikan merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan negara karena melalui pendidikan kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan. Dalam perjalanan sejarah Indonesia, setiap pemerintahan memiliki kebijakan pendidikan yang berbeda sesuai dengan tujuan politik dan arah pembangunan nasional pada masanya. Salah satu periode yang cukup berpengaruh dalam perkembangan pendidikan di Indonesia adalah masa Orde Baru yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998 di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Pada masa tersebut, pemerintah menjadikan pendidikan sebagai sarana untuk mendukung stabilitas nasional, pembangunan ekonomi, serta pembentukan karakter masyarakat yang sesuai dengan ideologi negara. (Widdah)

Pemerintah Orde Baru menerapkan berbagai kebijakan pendidikan untuk memperluas akses pendidikan masyarakat Indonesia. Kebijakan seperti pembangunan Sekolah Dasar Instruksi Presiden (SD Inpres), program wajib belajar, dan perubahan kurikulum menjadi bagian penting dalam upaya pemerataan pendidikan nasional. Melalui kebijakan tersebut, jumlah sekolah dan angka partisipasi pendidikan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, terutama di daerah-daerah yang sebelumnya masih memiliki keterbatasan akses pendidikan. Selain itu, pemerintah juga menanamkan nilai-nilai ideologi negara melalui mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang diterapkan di sekolah-sekolah sebagai upaya membentuk sikap disiplin dan loyalitas terhadap negara. (Fathiya et al.)

Namun, di balik keberhasilan tersebut, kebijakan pendidikan pada masa Orde Baru juga menimbulkan berbagai kritik. Sistem pendidikan yang bersifat sentralistik menyebabkan pemerintah memiliki kontrol yang sangat kuat terhadap kurikulum, materi pembelajaran, hingga pola pendidikan di sekolah. Pendidikan lebih diarahkan pada pembentukan stabilitas politik dibandingkan pengembangan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Akibatnya, proses pembelajaran cenderung berlangsung secara seragam dan kurang memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan analisis dan kebebasan berpendapat. Selain itu, pemerataan pendidikan yang dilakukan pemerintah belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. (Yuningsih)

Kebijakan pendidikan pada masa Orde Baru juga memberikan pengaruh terhadap sistem pendidikan di berbagai sekolah dasar, termasuk di SD Negeri Banjaragung 1. Sebagai salah satu lembaga pendidikan dasar, SD Negeri Banjaragung 1 turut merasakan dampak dari kebijakan pendidikan yang diterapkan pemerintah pada masa tersebut, baik dalam penerapan kurikulum, sistem pembelajaran, maupun penanaman nilai-nilai kedisiplinan dan nasionalisme kepada peserta didik. Oleh karena itu, kajian mengenai ketepatan kebijakan pendidikan Orde Baru di SD Negeri Banjaragung 1 menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut memberikan pengaruh terhadap perkembangan pendidikan di sekolah tersebut.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis ketepatan kebijakan pendidikan pada masa Orde Baru di SD Negeri Banjaragung 1. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kebijakan pendidikan, dampak yang ditimbulkan, serta relevansinya terhadap perkembangan pendidikan di sekolah. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan pendidikan pada masa Orde Baru serta menjadi bahan evaluasi bagi pengembangan pendidikan di masa sekarang dan masa yang akan datang.

## 2. METODE/METHOD

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur (library research). Metode ini digunakan untuk menganalisis kebijakan pendidikan pada masa Orde Baru serta penerapannya di SD Negeri Banjaragung 1 berdasarkan sumber-sumber tertulis yang relevan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, artikel, dan dokumen kebijakan pendidikan. Fokus kajian meliputi kebijakan SD Inpres, program wajib belajar, perubahan kurikulum, serta sistem pendidikan pada masa Orde Baru dan dampaknya di SD Negeri Banjaragung 1. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran pustaka, sedangkan analisis data menggunakan model reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara deskriptif. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai ketepatan kebijakan pendidikan Orde Baru, baik dari aspek akses maupun kualitas pendidikan di tingkat sekolah dasar.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN/RESULT AND DISCUSSION

#### **Gambaran Kebijakan Pendidikan dalam Masa Orde Baru di SD Negeri Banjaragung 1**

Berdasarkan kajian dan pengumpulan data dari berbagai sumber menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan pada masa Orde Baru sangat memengaruhi perkembangan pendidikan di SD Negeri Banjaragung 1. Pada masa Orde Baru, pendidikan dianggap sebagai salah satu alat penting pemerintah untuk mendukung pembangunan nasional. Pendidikan dianggap oleh pemerintah sebagai cara untuk menstabilkan politik, meningkatkan sumber daya manusia, dan membangun karakter masyarakat yang selaras dengan ideologi negara. Oleh karena itu, sistem pendidikan pada masa itu dirancang secara terpusat atau sentralistik. Akibatnya, pendidikan di sekolah-sekolah, termasuk di SD Negeri Banjaragung 1, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (Fathiya et al.)

Kurikulum, teknik pembelajaran, dan sistem kedisiplinan sekolah yang berlaku di seluruh Indonesia adalah contoh kebijakan pendidikan Orde Baru. Sebagai lembaga pendidikan dasar, SD Negeri Banjaragung 1 juga melaksanakan kebijakan tersebut dengan menyesuaikan proses pembelajaran sesuai dengan pedoman pemerintah. Pada era itu, pendidikan tidak hanya bertujuan untuk memberi siswa pendidikan akademik, tetapi juga untuk membangun sikap disiplin, patriotisme, dan kepatuhan terhadap negara.

Pemerintah Orde Baru menempatkan pendidikan sebagai bagian penting dari pembangunan masa depan, yang mengakibatkan peningkatan perhatian pemerintah terhadap pembangunan sekolah, termasuk sekolah dasar, di berbagai wilayah. Dalam kasus SD Negeri Banjaragung 1, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah selama era Orde Baru juga memengaruhi bagaimana sarana pendidikan dibangun dan bagaimana masyarakat lebih mudah mendapatkan pendidikan dasar. Di bawah program pembangunan sekolah yang dilakukan pemerintah pada saat itu, masyarakat memiliki kesempatan belajar yang lebih baik dibandingkan dengan masa lalu. (Masa and Baru)

Program pembangunan Sekolah Dasar Instruksi Presiden (SD Inpres), yang dimulai pada tahun 1973, adalah salah satu kebijakan yang paling berpengaruh selama Orde Baru. Tujuan dari program ini adalah untuk memperluas pemerataan pendidikan dasar bagi semua orang di Indonesia, terutama di daerah yang masih memiliki keterbatasan fasilitas pendidikan. Perkembangan pendidikan di SD Negeri Banjaragung 1 dipengaruhi oleh kebijakan pembangunan SD Inpres karena pemerintah mulai memprioritaskan penyediaan fasilitas pendidikan dasar dan pemerataan akses sekolah bagi masyarakat sekitar. (Masa and Baru)

#### **Perubahan Kurikulum dan Sistem Pendidikan di SD Negeri Banjaragung 1 Pada Masa Orde Baru**

Kurikulum pendidikan beberapa kali diubah oleh pemerintah selama Orde Baru untuk menyesuaikan sistem pendidikan dengan pembangunan nasional. Kurikulum 1968, 1975, 1984, dan 1994 mengalami perubahan. Setiap perubahan kurikulum menunjukkan upaya pemerintah untuk meningkatkan proses pendidikan dan membangun sistem pendidikan yang sesuai dengan kebijakan negara saat itu. Perubahan kurikulum di SD Negeri Banjaragung 1 juga berdampak pada metode pembelajaran, materi ajar, dan sistem evaluasi yang digunakan sekolah. (Fathiya et al.)

Pada tahun 1968, kurikulum awal Orde Baru berfokus pada pembentukan manusia Pancasila. Sebagai bagian dari upaya untuk stabilisasi politik setelah pergeseran pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru, kurikulum ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai disiplin, nasionalisme, dan setia kepada negara. Kurikulum yang diterapkan di SD Negeri Banjaragung 1 menunjukkan penekanan pada pembelajaran normatif seperti pembentukan karakter, kedisiplinan, dan penguatan nilai-nilai kebangsaan dalam proses pembelajaran. (*No Title*)

Selain itu, pendekatan yang lebih sistematis dan terarah digunakan untuk menerapkan Kurikulum 1975. Kurikulum ini menekankan pada menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas dengan menggunakan pendekatan sistem instruksional. Untuk membuat proses belajar mengajar lebih efektif dan efisien, guru di SD Negeri Banjaragung 1 harus menyusun tujuan pembelajaran dengan cermat. Pembelajaran biasanya berpusat pada pencapaian tujuan materi. Akibatnya, proses pendidikan cenderung lebih menekankan hasil belajar siswa daripada proses pengembangan kemampuan berpikir secara mendalam.

Kurikulum 1984 diperkenalkan oleh pemerintah dengan pendekatan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) pada tahun itu. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk membuat siswa lebih terlibat dalam

proses pembelajaran sehingga mereka tidak hanya menjadi penerima informasi tetapi juga berpartisipasi dalam kegiatan belajar. Di SD Negeri Banjaragung 1, CBSA mulai diterapkan melalui aktivitas pembelajaran, diskusi, dan tanya jawab di mana siswa terlibat secara langsung. Namun, karena banyak guru masih terbiasa dengan metode pembelajaran konvensional yang berpusat pada guru, pendekatan ini belum digunakan dengan baik.

Kurikulum 1994 mengalami perubahan lagi. Kurikulum ini berusaha menggabungkan berbagai pendekatan dari kurikulum sebelumnya dan menekankan keseimbangan antara proses pembelajaran dan penguasaan materi. Akan tetapi, materi pelajaran yang padat menyebabkan siswa sering mengalami beban belajar yang berat. Ini juga terlihat di SD Negeri Banjaragung 1, di mana siswa harus mempelajari banyak mata pelajaran dalam waktu yang terbatas, sehingga mereka tidak selalu dapat memahami materi dengan baik.

Meskipun perubahan kurikulum tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, temuan penelitian menunjukkan bahwa kepentingan politik pemerintah terus berdampak pada sistem pendidikan pada masa Orde Baru. Pendidikan tidak hanya berfungsi untuk menghasilkan penelitian, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk menyebarkan ideologi negara melalui topik seperti Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB). Mata pelajaran di SD Negeri Banjaragung 1 sangat penting untuk membentuk karakter siswa agar sesuai dengan nilai-nilai yang diharapkan pemerintah. (Fathiya et al.)

Akibatnya, proses pendidikan pada masa itu cenderung berlangsung seragam dan kurang memberikan kesempatan bagi siswa untuk tumbuh dalam kemampuan berpikir kritis. Pengembangan kreativitas dan kemampuan analisis siswa lebih diprioritaskan daripada hafalan, kepatuhan, dan disiplin. Siswa tidak diberi banyak kesempatan untuk berbicara secara bebas karena mereka hanya diminta untuk menerima materi yang telah ditentukan. Dalam situasi seperti ini, pendidikan lebih efektif untuk mempromosikan stabilitas sosial dan politik daripada untuk meningkatkan potensi intelektual siswa. (Ramadhan et al.)

Selain itu, sistem pendidikan yang sentralistik membuat pemerintah pusat menentukan kebijakan pendidikan secara keseluruhan tanpa mempertimbangkan keadaan dan kebutuhan setiap daerah. Semua sekolah di Indonesia memiliki kurikulum, buku pelajaran, teknik pembelajaran, dan sistem evaluasi yang sama, termasuk di SD Negeri Banjaragung 1. Meskipun demikian, fitur sosial, budaya, dan perkembangan pendidikan masing-masing daerah berbeda. (Sejarah and Sejarah)

Sistem tersebut menyebabkan pendidikan masih terjadi ketidaksesuaian, terutama dalam hal sumber daya dan fasilitas. Sekolah-sekolah di kota biasanya memiliki perpustakaan, alat pembelajaran, dan tenaga pendidik yang lebih memadai. Sebaliknya, SD Negeri Banjaragung 1 sebagai sekolah yang berada di luar perkotaan besar juga mengalami beberapa keterbatasan, terutama dalam hal sarana pembelajaran dan akses ke media pendidikan.

Ketempangan tersebut berdampak pada kualitas pembelajaran yang diterima siswa. Meskipun kurikulum yang digunakan sama, hasil pembelajaran dapat berbeda karena kondisi fasilitas dan kemampuan guru. Akibatnya, meskipun kebijakan perubahan kurikulum pada masa Orde Baru telah menghasilkan sistem pendidikan yang lebih terorganisir dan seragam, pemerataan kualitas pendidikan masih menjadi masalah yang belum sepenuhnya terselesaikan. Ini juga berlaku untuk pelaksanaan kurikulum di SD Negeri Banjaragung 1.

### **Analisis Ketepatan Kebijakan Pendidikan Orde Baru di SD Negeri Banjaragung 1**

Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan masa Orde Baru cukup tepat dalam hal pemerataan akses pendidikan dasar. Program pembangunan Sekolah Dasar Instruksi Presiden (SD Inpres) dan kebijakan wajib belajar di SD Negeri Banjaragung 1 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perluasan akses pendidikan bagi masyarakat. Di SD Negeri Banjaragung 1, kebijakan ini menunjukkan bahwa semakin banyak kesempatan bagi anak-anak usia sekolah untuk mengikuti pendidikan dasar tanpa menghadapi hambatan jarak jauh. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan juga berkontribusi pada peningkatan jumlah siswa yang hadir di sekolah. Jurnal Unimed Plus. (Fathiya et al.)

Selain itu, pemerintah Orde Baru berhasil meningkatkan ketersediaan pendidikan dalam waktu yang singkat. Hal ini berdampak pada semakin luasnya akses pendidikan ke daerah pedesaan. Keberadaan kebijakan ini di SD Negeri Banjaragung 1 mempengaruhi stabilitas proses pendidikan dasar, meskipun fasilitas masih terbatas. Secara keseluruhan, kebijakan tersebut menunjukkan

keberhasilan dalam hal kuantitas pendidikan, terutama dalam hal meningkatkan jumlah sekolah dan tingkat partisipasi siswa.

Namun, kebijakan tersebut belum sepenuhnya berhasil dalam hal kualitas pendidikan. Pendidikan di era Orde Baru lebih berfokus pada kuantitas daripada kualitas. Kondisi ini juga terlihat dalam proses pendidikan di SD Negeri Banjaragung 1, di mana peningkatan jumlah siswa tidak selalu diimbangi dengan kualitas sarana pembelajaran yang lebih baik dan tenaga pendidik yang lebih baik. Salah satu faktor yang memengaruhi kualitas pembelajaran di sekolah adalah keterbatasan fasilitas seperti media pembelajaran, buku penunjang, dan sarana praktik. (Fathiya et al.)

Selain itu, sistem pendidikan yang diseragamkan di seluruh negara membatasi kreativitas dan kebebasan berpikir siswa. Pada saat itu, pembelajaran di SD Negeri Banjaragung 1 lebih menekankan pada hafalan dan kepatuhan terhadap materi yang diajarkan dalam kurikulum. Siswa lebih banyak menerima materi tanpa banyak waktu untuk berpikir kritis atau memberikan pendapat mereka. Guru memiliki peran dominan dalam proses pembelajaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan di era Orde Baru belum sepenuhnya membantu siswa belajar berpikir logis.

Kebijakan pendidikan Orde Baru menunjukkan hubungan yang kuat antara politik pemerintah dan pendidikan. Pada masa itu, pendidikan tidak hanya digunakan untuk meningkatkan pengetahuan tetapi juga untuk menyebarkan ideologi negara melalui berbagai mata pelajaran, seperti Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB). Mata pelajaran ini merupakan bagian penting dari proses pembentukan karakter siswa di SD Negeri Banjaragung 1 agar sesuai dengan nilai-nilai yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam situasi seperti ini, pendidikan lebih cenderung ditujukan untuk membangun masyarakat yang patuh terhadap pemerintah daripada menanamkan pemikiran kritis dan demokratis. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan Orde Baru masih sangat terbatas dalam hal kebebasan akademik. Meskipun demikian, kebijakan tersebut masih membentuk nasionalisme dan disiplin siswa sekolah dasar.

Walaupun ada beberapa kekurangan, kebijakan pendidikan Orde Baru memberikan kontribusi besar untuk kemajuan pendidikan nasional di Indonesia, termasuk program pemerataan pendidikan yang diterapkan di SD Negeri Banjaragung 1. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan Orde Baru dapat dianggap cukup berhasil dalam memperluas akses pendidikan di seluruh negeri. (Fathiya et al.)

#### **4. KESIMPULAN/CONCLUSION**

Sekolah tersebut mengikuti arahan pemerintah pusat dalam hal kurikulum, teknik pembelajaran, dan sistem kedisiplinan. Program seperti SD Inpres dan wajib belajar sangat penting untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar. Program-program ini juga membantu meningkatkan jumlah siswa di SD Negeri Banjaragung 1.

Kurikulum yang berubah selama Orde Baru, mulai dari 1968, 1975, 1984, dan 1994, menunjukkan upaya pemerintah untuk meningkatkan sistem pendidikan agar lebih terarah dan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Namun, faktanya adalah bahwa sistem pendidikan masih berfokus pada hafalan, kepatuhan, dan penanaman ideologi negara. Akibatnya, ruang untuk kreativitas dan pemikiran kritis siswa masih terbatas.

Selain itu, meskipun kebijakan pendidikan Orde Baru meningkatkan akses dan partisipasi siswa, kualitas pendidikan masih rendah, terutama dalam hal fasilitas pendidikan, tenaga pengajar, dan sarana pendidikan di daerah. Ini juga dirasakan di SD Negeri Banjaragung 1, yang masih menghadapi beberapa keterbatasan dalam bidang pendidikan.

Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan masa Orde Baru di SD Negeri Banjaragung 1 cukup tepat dalam hal pemerataan akses ke pendidikan, tetapi belum sepenuhnya berhasil dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Kebijakan tersebut masih memberikan kontribusi besar untuk kemajuan pendidikan nasional, tetapi masih ada beberapa kelemahan yang perlu dievaluasi untuk pengembangan pendidikan saat ini.

## 5. REFERENCES

- Fathiya, Siti, et al. "Kebijakan Pendidikan Islam pada Era Kontemporer." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, vol. 12, no. 1, 2024, pp. 45–58.
- Masa, Pada, dan Orde Baru. "Kebijakan Pendidikan pada Masa Orde Baru." *PUTERI HIJAU: Jurnal Pendidikan Sejarah*, vol. 8, no. X, 2023, pp. 368–372. <https://doi.org/10.24114/ph.v8iX.50917>.
- Ramadhan, Fauzan Syahru, et al. "Sejarah Pendidikan Indonesia Masa Orde Baru: Menguak Keberhasilan dan Kegagalan Kebijakan Pemerintah Orde Baru dalam Bidang Pendidikan." *Jurnal Pendidikan Indonesia*, vol. 5, no. 1, 2024, pp. 22–35.
- Sejarah, Pendidikan, dan Pembelajaran Sejarah. *Jurnal Daftar Isi*, vol. 2, no. 2, 2015.
- Widdah, Minnah El. "Kebijakan Pendidikan di Masa Orde Baru." *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial*, vol. 4, no. 3, 2024, pp. 3853–3864.
- Yuningsih, Heni. "Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Baru." *Jurnal Tarbiyah dan Pendidikan Islam*, vol. 10, no. 2, 2015, pp. 175–194.